

PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) MEKAR WANGI DI KELURAHAN TANGKERANG BARAT

IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MEKAR WANGI KAMPUNG FAMILY (KB) PROGRAM IN TANGKERANG BARAT URBAN VILLAGE

Muhamad Alfarezi Saputra¹, Mayarni²

¹ Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau, Pekanbaru, RiauE-

mail: Muhamad.alfarezi0158@student.unri.ac.id

Abstrak: Peningkatan jumlah penduduk atau dinamika kuantitasnya yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek yang cukup signifikan, salah satunya mempengaruhi kualitas hidup terhadap fungsi pembangunan nasional, sustainability penduduk maju atau smart people dan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini memiliki tujuan demi mengetahui bagaimana Pelaksanaan dan Tantangan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Mekar Wangi Di Kelurahan Tangkerang Barat. Metode riset yang digunakan adalah riset kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Riset ini menghasilkan temuan bila Kampung KB Mekar Wangsi telah melaksanakan beberapa program utama yakni adanya bank sampah, meningkatkan ekonomi melalui kerajinan tangan, dari aspek kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan lansia dan melakukan olah raga rutin. Hambatan dalam riset ini adalah Coronavirus disease 2019, partisipasi masyarakat, sumber daya pengkaderan, dan anggaran.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program, Kampung KB

Abstract: *The increase in population or uncontrolled quantity dynamics can affect people's lives in various significant aspects, one of which affects the quality of life for the function of national development, the sustainability of the advanced population or smart people and the economic conditions of the local community. This study aims to find out how the Implementation and Challenges of the Mekar Wangi Quality Family Village (KB) Program in Tangkerang Barat Village. The research method used is qualitative research using a case study approach. This research resulted in the finding that Mekar Wangsi KB Village has implemented several main programs, namely the existence of a waste bank, improving the economy through handicrafts, from health aspects such as health checks for the elderly and doing regular exercise. The obstacles in this research are the 2019 Coronavirus disease, community participation, cadre resources, and budget.*

Keywords: *Policy Implementation, Procurement of Products and Services, SIPLah*

PENDAHULUAN

Permasalahan kependudukan menjadi hal umum yang harus segera diatasi dengan prospek jangka panjang dan berkelanjutan, mengingat banyaknya aspek dan keterlibatan masyarakat yang sangat besar. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus menciptakan program – program yang mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk, hal ini dengan memanfaatkan partisipasi aktif sekaligus public interest yang mayoritas sulit dikendalikan. Khususnya pada wilayah Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah penduduk 983.365 Jiwa pada tahun 2020 (SP2020), dan bila dikarakterisasi berdasarkan jumlah penduduk berjenis laki – laki yakni 495.117 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 488.239 jiwa.

Masalah kemiskinan ini berhubungan erat dengan permasalahan ketenagakerjaan dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, hal ini juga dipengaruhi oleh kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan jika jumlah penduduk tinggi maka jumlah lapangan pekerjaan tidak akan memenuhi kuantitas tersebut, sehingga menciptakan banyaknya masyarakat yang pengangguran. Hal ini didukung oleh data berdasarkan survei angkatan kerja nasional bahwa pada agustus 2020 jumlah angkatan kerja di Pekanbaru yakni berjumlah 242.012 Laki Laki dan 213.126 Perempuan, dengan jumlah 507.617 penduduk yang bekerja, dan sisanya berstatus pengangguran. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekanbaru tahun 2020 bahwa sebesar 65,22 dan tingkat pengangguran sebesar 8,56 yang artinya dari 100 penduduk usia kerja terdapat 65 orang diantaranya yang berpartisipasi aktif di dunia kerja, serta 8,56% dari jumlah angkatan kerja adalah pengangguran. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 7,86 pada tahun 2019.

Ketidakseimbangan total penduduk dengan sumber daya yang ada menyebabkan terganggunya fungsi kehidupan dalam aspek pembangunan kualitas hidup masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fungsi penduduk sebagai sasaran dan subjek pembangunan nasional, karena penduduk yang maju/smart society merupakan penduduk yang memiliki kecenderungan untuk melakukan perubahan, dan menerima peningkatan kapasitas dengan nilai luhur budaya bangsa, oleh karena itu pada hakikatnya pembangunan nasional berarti demokrasi yang memiliki sumber serta output dan sasaran yang utama masyarakat.

Peningkatan jumlah penduduk atau dinamika kuantitasnya yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek yang cukup signifikan, salah satunya mempengaruhi kualitas hidup terhadap fungsi pembangunan nasional, sustainability penduduk maju atau smart people dan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Maka dari itu pemerintah membentuk program Kampung Keluarga Berencana untuk menjawab permasalahan tersebut, hal ini dilaksanakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, serta peningkatan kualitas penduduk dengan adanya kegiatan rutin yang berbasis pemberdayaan di tingkat kelurahan, hal ini dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam aspek kesehatan dan kondisi sosial ekonomi.

Kampung KB merupakan wujud dari implementasi agenda prioritas pembangunan nawacita ke 3, 5 dan 8. Yakni pada nawacita ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat ketahanan daerah dan desa dalam kerangka kesatuan. Nawacita kelima yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta terakhir nawacita kedelapan yakni melakukan revolusi karakter bangsa dengan adanya kebijakan

penataan kurikulum pendidikan nasional dengan mengutamakan pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan aspek pendidikan secara proposional, seperti adanya pengajaran sejarah pembentukan bangsa dan nilai patriotisme, nasionalisme, dan budi pekerti.

Maka dari itu Kampung KB menjadi inovasi yang strategis dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan pemberdayaan dan edukasi masyarakat secara paripurna di lapangan, pasalnya Kampung KB merupakan miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mengingat bahwa goals utama adalah menyejahterakan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya integrasi program lintas sektor.

Salah satu Kampung KB di Kota Pekanbaru adalah Kelurahan Tangkerang Barat di Kecamatan Marpoyan Damai yakni kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 yakni berjumlah 127.600 ribu jiwa, dengan laju pertumbuhan 0,15 % per tahun 2010 – 2020 dari total keseluruhan laju penduduk per tahun 2010 – 2020 0,89 di Kota Pekanbaru. Adapun kriteria ditetapkan Kelurahan Tangkerang Barat selaku Kampung KB Terbaik di Kota Pekanbaru yakni salah satunya Kondisi ekonomi Kelurahan Tangkerang Barat berdasarkan data dari Kelurahan Tangkerang Barat yakni memiliki potensi unggulan dalam bidang perikanan, pertanian dan mayoritas perdagangan.

Kampung KB memiliki banyak manfaat bagi keluarga. Tidak hanya bermanfaat dari sisi kesehatan tetapi juga bermanfaat dari sisi ekonomi dan sosial budaya. Penduduk menjadi modal utama pembangunan sehingga menjadi dasar dan sasaran semua kebijakan pembangunan Negara. hal ini dapat dilihat pada salah satu kelurahan yakni Tangkerang Barat, Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu kelurahan dengan keaktifan Kampung KB yang cukup baik.

Selaku bentuk dukungan pelaksanaan kegiatan program Kampung KB Mekar Wangi Kelurahan Tangkerang Barat terdapat stakeholders pendukung yakni adalah stakeholders serta sarana prasarana yang dirincikan sabagai berikut : Adanya Kader PPKBD dan SUB PPKBD, adanya Data Penduduk PLKB/PKB, adanya Bidan (Fasilitas Kesehatan Pemerintah), terbentuknya Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKS), adanya PIK-Remaja, dukungan Tokoh Agama dan Masyarakat, adanya fasilitas jalan, adanya Sekolah, adanya Posyandu, adanya Kader,dll.

Namun kampung KB Mekar Wangi masih memiliki kendala dalam hal pelaksanaan kegiatan yaitu; Bangunan Sekretariat untuk kegiatan belum ada sehingga masih bergabung dengan gedung Posyandu, selanjutnya keterlibatan lintas program terkait masih rendah, dan tingkat pengetahuan kader mengenai program ini masih rendah, serta kondisi lingkungan yang belum tertata dengan baik.

Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan Kampung KB di Tangkerang Barat Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas nhidup masyarakat, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga, serta pembangunan sector lainnya. Mengetahui peran masyarakat yang seharusnya menjadi subjek sekaligus objek pelaksanaan program Kampung KB ini, dikelola dan diselenggarakan oleh dan utuk masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan dan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan yang prima mewujudkan keluarga berkualitas. Beberapa fenomena yang penulis temukan yakni:

1. Pengorganisasian atapun pelimpahan tugas yang diberikan kepada masing – masing penanggungjawab pokja yang terdata pada struktur kepengurusan tidak berjalan maksimal, hal ini terkendala oleh kemampuan sumber daya

- manusia dan status sosial mereka yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga, sehingga abstraksi pelaksanaan kegiatan dan tanggungjawab terhadap jabatan yang mereka miliki belum dapat terealisasi dengan baik, dan memberikan hasil yang optimal pada penyelenggaraan kegiatan di Kampung KB Mekar Wangi.
2. Kampung KB Mekar Wangi memiliki sub unit kegiatan yang membentuk beberapa kelompok kegiatan aktif yang melibatkan banyak masyarakat, sehingga mempengaruhi kredibilitas dan kapasitas penyelenggara untuk fokus pada tanggungjawab mereka, hal ini dapat dilihat bila dari setiap kegiatan memiliki penanggungjawab yang berbeda, dan menimbulkan tumpang tindih jabatan atau tanggungjawab yang mayoritas diemban oleh orang yang sama.
 3. Berdasarkan struktur pokja Kampung KB Mekar Wangi sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat oleh BKKBN, bidang – bidang dalam pokja tersebut diisi oleh masyarakat setempat atau pegawai kelurahan dengan konsep rangkap jabatan, seperti halnya kelurahan yang menjadi ketua Kampung KB, namun hal ini dilaksanakan sesuatu dengan ketentuan BKKBN. Akan tetapi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut dapat dikatakan belum memiliki kemampuan yang sesuai atau berkapabilitas di bidangnya, hal ini disebabkan oleh skill atau keahlian yang dimiliki oleh pengurus Kampung KB Mekar Wangi itu sendiri.
 4. Jika Kampung KB tidak bisa dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten misalnya PLKB atau kader yang kompeten untuk menyampaikan edukasi tentunya menjadi suatu kendala. Masalahnya untuk menguasai materi-materi ketahanan keluarga itu juga tidak mudah. Maka dari itu hasil yang dihasilkan dari program Kampung KB Mekar Wangi belum maksimal, mengingat bila Kampung KB dibentuk untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat, namun yang melaksanakan atau yang bertanggungjawab terhadap program pembinaan tersebut juga berasal dari masyarakat yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga tanpa background pendidikan yang sesuai dengan bidang pembinaan, sehingga pokja berjalan tidak efektif dalam melaksanakan Kampung KB tersebut.
 5. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksanaan program Kampung KB ini adalah forum diskusi, pusat informasi konseling remaja adanya kegiatan aksi dan pembekalan dalam bentuk outbond kepada remaja mengenai reproduksi, bahaya pergaulan bebas, narkoba dan pembinaan akhlak, hal ini bekerjasama dengan genre pekanbaru, adanya pengurus remaja peduli stunting, sebelum pandemi ada rencana buka galery di living world namun akibat pandemi jadinya rencana tersebut batal, dan digantikan dengan upaya gotong royong, pembagian masker, pembuatan

gapura, pembuatan grafiti edukasi, hal ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat seperti tokoh masyarakat, pengurus masjid, karang taruna, dan lainnya.

6. SOP tertulis Kampung KB Mekar Wangi belum ada, namun dilakukan secara konvensional dengan diadakan diskusi dan rapat. Stunting adalah edukasi kesehatan reproduksi dan gizi yang membahas tentang pemahaman terkait kesehatan dan gizi anak, perilaku tentang pengasuhan keluarga yang sehat dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan tumbuh kembang anak. Pada Kampung KB Mekar Wangi sosialisasi dan kegiatan waspada stunting ini dilaksanakan oleh PIK – R Kota Pekanbaru yang berkolaborasi dengan PIK – R Kampung KB Mekar Wangi, keanggotaan PIK – R tersebut berasal dari perkumpulan anak usia remaja yang berdomisili disekitar wilayah Kelurahan Tangkerang Barat.

Salah satu definisi kebijakan menurut James E. Anderson adalah kebijakan merupakan perilaku dari sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan kebijakan memiliki relevansi dengan kepentingan kelompok atau individu tertentu baik dalam aspek pemerintah maupun masyarakat (Indiahono. 2017:17).

Islamy dalam Anggara (2012:501) mengemukakan bila kebijakan publik merupakan serangkaian perilaku yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada visi tertentu demi relevansi seluruh masyarakat. Dalam

pengertian Islamy terdapat empat pengertian mengenai kebijakan public, yaitu :

1. Kebijakan publik dalam bentuk perdananya berupa penetapan perilaku pemerintah;
2. Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk nyata;
3. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan visi tertentu;
4. Kebijakan publik harus senantiasa ditujukan bagi relevansi seluruh anggota masyarakat.

Mulyadi (2016:72) mengutip teori van meter van horn yang memberikan 6 variable dalam mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yakni: standard an sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, komisi sosial, ekonomi dan politik, dan terakhir disposisi implementor.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle (Anggara, 2014:256), yaitu:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, digunakan oleh pelaksana yang terlibat untuk memperlancar implementasi kebijakan, sehingga membuka peluang lebih besar dalam perwujudan tujuan kebijakan.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, memerlukan keterbukaan dan kejelasan agar dapat dipahami para pelaksana dan tidak menimbulkan kebingungan.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana, sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (Studi Pada Kelompok Sasaran Keluarga Dengan Remaja Di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk) dimana Hasil riset menunjukkan bila setiap indikator di dalam teori tersebut yaitu:

(1) komunikasi yang berisikan transmisi yang dilakukan dengan sosialisasi berupa undnagan sosialisasi di balai desa dan di berikan pembekalan, kejelasan informasi masih belum dimengerti betul oleh masyarakat, dan konsistensi program Kampung KB di lakukan dengan berdasarkan Juknis Kampung KB

(2) sumber daya yang berisikan sumber daya manusia dengan jumlah yang sudah mencukupi, anggaran yang didapatkan berasal dari BKKBN Provinsi, APBD, serta ADD, sementara fasilitas yang diberikan yaitu berupa tempat kegiatan dan juga tambahan buku binaan untuk para kader

(3) dan struktur birokrasi yaitu terdapat SOP yang mana menggunakan Juknis Kampung KB selaku pedoman prosedur pelaksanaan Kampung KB serta fragmentasi yang mana pembagian tugas yang dijalankan oleh Dinas PPKBD, UPT-PPKBD Kecamatan Prambon, PLKB, dan kader sudah sesuai dengan buku petunjuk teknis Kampung KB. Ketiga indikator tersebut sudah dikatakan berjalan sesuai dengan harapan. Teori: Implementasi Kebijakan Publik (Dun dalam Pasolong, 2014:39).

Penelitian serupa juga dilakukan Tiara Anggraini dan Weni Rosdiana (2019) menggunakan Teori: Efektivitas Mahmudi (2015:86) dengan Hasil Riset ini adalah belum Efektifnya Pelaksaaan Program Kampung KB di Kecamatan Rumbai Pesisir Kelurahan Meranti Pandak, ditandai dengan kurangnya komitmen dan komunikasi dan pengetahuan dari pemerinta daerah dalam hal ini Kecamatan Rumbai Pesisir mengenai Program Kampung KB yang berjalan di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir (Meranti Mandiri).

Penelitian ini membahas analisis dari teori Charles O. Jones (dalam Arif Rohman 2009: 101-102) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian; Riset ini bervisi mengetahui struktur oganisasi yang jelas yang dilakukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana di Kampung KB Mekar Wangi apakah terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi; Riset ini bervisi mengetahui apakah Kampung KB Mekar Wangi mampu menjalankan program supaya visi yang diharapkan dapat tercapai. Dalam hal ini peneliti ingin menelaah apakah Kampung KB Mekar Wangi memiliki petunjuk teknis yang dapat dijadikan spedoman oleh para pelaksana program Kampung KB Mekar Wangi.
3. Penerapan atau Aplikasi; Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas supaya program kerja Kampung KB Mekar Wangi dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam perjalanan program, prosedur kerja yang jelas dapat membantu pelaksanaan program menjalankan tugasnya mengelola sebuah pekerjaan yang mengandung penegertian mengenai apa, dan bagaimana pekerjaan yang harus diselesaikan.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan

teknik *purposive sampling* dengan tujuan informan dalam penelitian ini adalah orang dianggap mengetahui situasi dan permasalahan yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riset ini berfokus pada pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disingkat Kampung KB selaku menjembatani kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk direalisasikan kepada masyarakat. Maka dari itu selaku sebuah pendekatan pembangunan yang bersifat universal, dan hal ini menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pelaksanaan Kampung KB ini di kelurahan Tangkerang Barat khususnya. Berikut poin – pin pembahasan yang telah penulis analisis melalui observasi dan penelutian langsung ke lokus penelitian.

Penelitian ini menganalisa konsep yang telah dikemukakan pada teori Charles O. Jones (dalam Arif Rohman 2009: 101-102) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian

Riset ini bervisi mengetahui system pengorganisasian atau pelimpahan wewenang dan pembagian tugas serta tanggung jawab masing – masing kepada aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Kampung KB Mekar Wangi, idealnya dibutuhkan pendelegasian wewenang kepada stakeholders – stakeholders yang terlibat, khususnya dalam struktur kepengurusan atau pelaksanaan Kampung KB Mekar Wangi. Penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Istiqomah Pelaksana Kampung KB Mekar Wangi, beliau menyatakan bila:

“Tidak ada anggaran khusus untuk kampung KB, sekretariat saja di posyandu, dan dinas hanya memberi dana transport itupun kalau ada narasumber dari mereka, kalau tidak ya tidak ada..” (Wawancara dengan Pelaksana Kampung KB Mekar Wangi, 10 Februari 2022).

Dapat dianalisis bila selakumana yang telah disebutkan sebelumnya bila implementasi program Kampung KB merupakan perilaku-prilaku yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap program Kampung KB atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai visi-visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Visi Kampung KB yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lurah Tangkerang Barat selaku Ketua Kampung KB Mekar Wangi, menyatakan bila:

“Kader kampung KB mayoritas ibu – ibu yang sudah bekeluarga sehingga adanya keterbatasan dalam menggunakan aplikasi dan update data di website, sehingga data terbaru dapat dilihat melalui buku laporan secara manual.” (Wawancara dengan Ketua Kampung KB Mekar Wangi, 23 Oktober 2021).

Idealnya petugas kampung KB menjaga kesinambungan dan pengembangan kegiatan di Kampung KB dengan mengadakan rapat koordinasi secara rutin dan mendiskusikan perkembangan program secara menyeluruh dari segi realisasi dan perencanaan yang terkoordinasi melalui musyawarah forum dan sebagainya. Hal ini akan terlihat dampak yang cukup signifikan dari waktu ke waktu mengikuti arahan dari BKKBN selaku instansi yang

bertanggungjawab atas pelaksanaan Kampung KB ini. Dapat dilihat peningkatan frekuensi dan kualitas berbagai kegiatan seperti adokasi, peningkatan kualitas pelayanan KB, rutin pertemuan kelompok kegiatan posyandu, BKL, BKR, BKB, dan UPPKS. Tambahan lanjutan juga dapat terjadi peningkatan partisipasi dalam metode kontrasepsi jangka panjang, dan semua masyarakat yang terlayani disetiap program yang ada di Kampung KB Mekar Wangi.

2. Interpretasi

Riset ini bervisi mengetahui apakah Kampung KB Mekar Wangi mampu menjalankan program supaya visi yang diharapkan dapat tercapai. Dalam hal ini peneliti ingin menelaah apakah Kampung KB Mekar Wangi memiliki petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman oleh para pelaksana program Kampung KB Mekar Wangi. Sebuah program telah disetujui, peraturan sudah ditetapkan dan organisasi sudah ada maka saatnya untuk memahami maksud peraturan tersebut serta untuk menyiratkan apa yang dimaksud mengenai program tersebut (Jones, 1996:320).

Kampung KB Mekar Wangi mengikuti mekanisme operasional yang ditetapkan oleh BKKBN yakni, adanya rapat perencanaan kegiatan, rapat koordinasi dengan dinas atau instansi terkait pendukung kegiatan. Adanya sosialisasi kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan, serta penyusunan laporan yang dilakukan secara berkala disetiap bulannya. Namun pengurus belum mengetahui rincian petunjuk teknis ini dan hanya mengikuti arahan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat adalah apakah pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan

Tangerang Barat Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

“Kampung KB diketuai oleh Lurah, sekretaris dan bagian lainnya diambil dari kampung keluarga berkualitas yang selanjutnya disingkat Kampung KB. Beberapa stakeholder membantu dalam hal anggaran, contohnya adalah citraland yang membiayai pelaksanaan senam setiap bulan yakni 500.000 dan biaya posyandu 200.000 setiap pengadaan.”(Wawancara dengan Ketua RW Kampung KB Mekar Wangi, 23 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bila dibandingkan dengan informasi yang tertera di petunjuk teknis oleh BKKBN tahun 2021 menyebutkan bila seluruh biaya operasional dari pelaksanaan program di Kampung KB tebagi atas beberapa sumber yakni yang paling utama adalah bantuan dari pemerintah lokal seperti RW/RT yang lebih berperan aktif setiap pengadaan kegiatan. Namun bila terdapat kegiatan yang mengharuskan mengundang Dinas penanggungjawab Kampung KB maka biaya akan dialokasikan oleh dinas tersebut kepada penanggungjawab kampung KB.

Jika Kampung KB tidak bisa dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten misalnya PLKB atau kader yang kompeten untuk menyampaikan edukasi tentunya menjadi suatu kendala. Masalahnya untuk menguasai materi-materi ketahanan keluarga itu juga tidak mudah. Maka dari itu hasil yang dihasilkan dari program Kampung KB Mekar Wangi belum maksimal, mengingat bila Kampung KB dibentuk untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat, namun yang melaksanakan atau yang

bertanggungjawab terhadap program pembinaan tersebut juga berasal dari masyarakat yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga tanpa background pendidikan yang sesuai dengan bidang pembinaan, sehingga pokja berjalan tidak efektif dalam melaksanakan Kampung KB tersebut. Selain itu tuntutan tugas juga tidak dapat dibebankan kepada masyarakat secara mutlak, hal ini mengingat bila konsep dari kepengurusan Kampung KB Mekar Wangi adalah bakti sosial atau kerelawanan dan kepedulian semata.

3. Penerapan atau Aplikasi

Kampung KB adalah program pembangunan yang seharusnya berjalan secara sistematis, hal ini mengingat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan berbagai aktor terutama kehadiran masyarakat selalu subjek sekaligus objek dalam pelaksanaan program. Selain dikelola berdasarkan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. pengorganisasian atau pelimpahan wewenang, dan penyerahan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam setiap kegiatan yang ada harus diberikan secara terstruktur dan terintegrasi.

Beberapa kegiatan terbaru dari program Kampung KB Mekar Wangi adalah adanya forum diskusi, pusat informasi konseling remaja dan kegiatan aksi serta pembekalan dalam bentuk outbond kepada remaja mengenai reproduksi, bahaya pergaulan bebas, narkoba dan pembinaan akhlak, hal ini bekerjasama dengan genre pekanbaru, adanya pengurus remaja peduli stunting, sebelumnya Kampung KB sudah merencanakan beberapa kegiatan yang melibatkan interaksi cukup signifikan, namun akibat pandemi rencana tersebut harus dibatalkan, dan digantikan

dengan kegiatan kecil yang tidak melibatkan banyak interaksi yang intens gotong royong, pembagian masker, pembuatan gapura, pembuatan grafiti edukasi, hal ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat seperti tokoh masyarakat, pengurus masjid, karang taruna, dan lainnya.

Maka dari itu kegiatan di Kampung KB mayoritas berubah menjadi edukasi atau penyuluhan terkait pengentasan kasus covid19 di Kelurahan Tangkerang Barat, seperti menjaga jarak, sosialisasi penggunaan masker dan handsanitizer, aktivitas pengecekan kesehatan lansia, beberapa kegiatan juga tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena kekurangan kader – kader dilapangan. Sehingga beberapa kegiatan terpaksa vakum untuk sementara waktu.

Dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, partisipasi merupakan wujud dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap betapa pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, yang artinya melalui partisipasi yang diberikan berarti benar – benar mengetahui bahwa kegiatan pembangunan bukan sekedar kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan meningkatkan kualitas hidupnya. Maka dari itu partisipasi memiliki arti yang sangat penting ketika datang terhadap keikutsertaan masyarakat. Mempunyai fungsi yang penting dalam pemerintahan dan pembangunan, karena tanpa partisipasi masyarakat maka pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan optimal.

Kampung KB Mekar Wangi juga Membahas program kerja yang

disesuaikan dengan kearifan lokal seperti pada seksi agama akan mengadakan wirid gabungan di kelurahan. Membahas Rencana kerja masyarakat tahun 2019 yang belum terlaksana akan dilaksanakan tahun 2020, akan dibuat dan ditempel didinding setelah dilaksanakan dibuat ceklis pada kegiatan tersebut. Diharap di Kampung KB tahun 2020 RKM bisa terlaksana sesuai dengan ketentuan dan berdampak positif di masyarakat.

Meski pemerintah telah mengeluarkan program KB, namun program tersebut mengalami penurunan dengan berbagai persoalan, mulai dari pencapaian peserta KB yang mengalami penurunan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program tersebut selaku keperluan kesehatan serta kesejahteraan di masa yang akan datang, Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bila partisipasi dari pihak Kelurahan belum cukup maksimal dalam melaksanakan program Kampung KB ini, meningkat minimnya fasilitas dan sumber daya manusia yang terlibat aktif.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kampung KB ini dilihat dari bagaimana dapat mendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhannya sebagaimana mestinya, itu didapatkan masyarakat secara aktif memberikan ide – ide mereka kepada penanggungjawab program atau kelompok Kegiatan agar kualitas program tetap terjaga. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat juga memberikan energy untuk melaksanakan kegiatan mereka yang sedang berlangsung sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan oleh Kampung KB Mekar Wangi. Contoh bantuan yang dapat diberikan oleh masyarakat adalah berupa ide,

tenaga, material, makanan dan bentuk jasa lainnya yang secara spontan dapat berhubungan dengan kesadaran dan tanggungjawab masing – masing individu untuk meningkatkan kualitas keluarganya dengan memanfaatkan program Kampung KB ini.

Maka dari itu berdasarkan hasil analisis wawancara di atas bila Kampung KB Mekar Wangi belum berjalan dengan optimal, masih banyak hambatan – hambatan yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan tata cara pelaksanaan dan pengorganisasiannya, baik dari segi sumber daya maupun abstraksi pelaksanaannya.

Berdasarkan analisis di atas bahwa pelaksanaan program Kampung KB Mekar Wangi belum berjalan dengan optimal, dilihat berdasarkan 3 aspek yakni pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan program yang dilaksanakan oleh pengurus atau pelaksana Kampung KB Mekar Wangi, berikut ini penjabaran tentang faktor penghambat pelaksanaan kegiatan – kegiatan pada program Kampung KB Mekar Wangi.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kb) Mekar Wangi Di Kelurahan Tangkerang Barat

Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang memiliki tingkat kepuasan hidup pada area fisik, psikologis, sosial, aktivitas, materi, dan kebutuhan structural/ hal ini merupakan perasaan sejahtera yang berasal dari rasa puas dengan kehidupannya, maka dari itu Kampung KB bertanggungjawab melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dalam hal ini.

Program Kampung KB melibatkan banyak interaksi dan partisipasi, sehingga

keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, namun ketika pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang menjadikan pelaksanaan program tidak dapat berjalan dengan maksimal, beberapa hambatan tersebut antara lain:

1. Faktor Coronavirus Disease 2019

Covid19 merupakan kondisi tidak terduga dalam bentuk bencana virus yang menyebar dengan cepat diseluruh wilayah, hal ini disebabkan oleh interaksi antar manusia yang dapat menyadi sumber penyebaran virus. Oleh karena itu Covid19 menjadi hambatan yang paling utama dalam melaksanakan kegiatan di Kampung KB Mekar Wangi, mengingat bahwa interaksi menjadi hal utama dan mayoritas kegiatan yang dilaksanakan pasti melibatkan masyarakat dan interaksi sosial. Sehingga peran pengurus Kampung KB menjadi lebih berat dan bertambah, akibat harus memperhatikan laju penyebaran virus sekaligus kondisi sosial masyarakat dimasa pandemic Covid19.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama merealisasikan program Kampung KB Mekar Wangi sedari tahun 2020 hingga awal tahun 2022 yakni berjumlah 43 kegiatan, hal ini selaras dengan data presentase partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Kampung KB Mekar Wangi berdasarkan setiap pokja dengan jumlah terkecil pada presentase 0,35% partisipasinya dan tertinggi hanya 8,3%.

2. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sebagai penerima layanan dapat menyampaikan masukan atas setiap program yang dijalankan oleh pengurus kampung KB, namun pada faktanya bahwa masyarakat yang memiliki

keberanian untuk kritis dan aktif sangat sedikit, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dan minimnya kebutuhan masyarakat yang terealisasikan khususnya dalam bidang pembinaan keluarga. Kampung KB sudah mencoba untuk mengintegrasikan berbagai aktor agar terlibat aktif, namun minimnya respon menjadi hambatan bagi pelaksanaannya. Bahkan metode kontrasepsi MKJP masih belum diminati oleh penduduk setempat, partisipasi masyarakat sekitar Kampung KB Mekar Wangi sangat minim terhadap pelaksanaan KB, padahal program ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat

3. Sumber Daya Pengkaderan

Selaku bentuk implementasi program Kampung KB ini membutuhkan kader – kader yang memahami bidangnya, yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam memberikan edukasi ataupun hal – hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat. dalam hal partisipasi dan pengaruhnya atas kelancaran program atau kegiatan yang telah direncanakan.

Kampung KB sudah berjalan selama 4 tahun, dan kelurahan aktif untuk menyertai pelaksanaan baik dari segi partisipasi dan anggaran selama kurang lebih 1,5 tahun. Tantangannya kita harus sabar ya dengan masyarakat, orang ini berbeda – beda, ada yang tidak bisa diajak maju dan bekerjasama. Kita udah sering melakukan upaya penyuluhan, saya juga sering memperkenalkan dari mulut ke mulut, tentunya ada tanggapan positif dan negatif ya, tapi karena ada program dari Dinas pengendalian penduduk dan KB yang sifatnya gratis, jadi ada partisipasi masyarakat yang ikut

meskipun tidak banyak dan harus jemput bola dulu ya.

4. Anggaran

Peran BKKBN tidak hanya fokus dalam kerangka kerja Program KKBP, tetapi juga perlu memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan berbagai permasalahan program yang harus dihadapi saat ini. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi Program KKBP di lini lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan dan atas petunjuk Bapak Presiden Republik Indonesia, maka kemudian dirumuskan inovasi strategis penguatan Program KKBP yaitu Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

Program kampung KB merupakan program yang membutuhkan koordinasi dari berbagai lembaga karena kampung KB bukan hanya untuk pengendalian penduduk saja melainkan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Manfaat Kampung KB selain dapat mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat karena program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat supaya berperan nyata dalam pembangunan.

Dalam hal pelaksanaan Kampung KB Mekar Wangi di Kelurahan Tangkerang Barat terdapat pengorganisasian yang diwujudkan kedalam susunan Kelompok Kerja (Pokja) selaku bagian dari abstraksi pelaksanaan Kampung KB. Sebagian besar pemilihan pokja

kurang memperhatikan mengenai potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, sehingga banyak SDM potensial yang belum terlibat dalam kepengurusan Kampung KB. Permasalahan lainnya adalah sebagian pokja Kampung KB, belum memahami dengan baik terhadap ketentuan tugas dan fungsi mereka dalam kepengurusan.

SIMPULAN

Penulis menemukan hasil dari data yang diperoleh dari hasil riset melalui observasi dan wawancara di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Mekar Wangi Di Kelurahan Tangkerang Barat konsep yang telah dikemukakan pada teori Charles O. Jones (dalam Arif Rohman 2009: 101-102) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi atau pelaksanaan. Menghasilkan bila pelaksanaan Kampung KB tersebut sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa tantangan yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan Kampung KB tersebut, baik dari segi dampak maupun keberlanjutan jangka panjang, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh stakeholders yang terlibat.

Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Mekar Wangi Di Kelurahan Tangkerang Barat adalah Coronavirus disease 2019, partisipasi masyarakat, sumber daya pengkaderan, dan anggaran. Hal ini dilihat melalui turunnya angka Implementasi Kegiatan Kelompok KB Mekar Wangi Per-tahun 2020 hingga awal tahun 2022. Metode kontrasepsi MKJP masih belum diminati oleh masyarakat, Keterlibatan lintas program terkait masih rendah, Tingkat pengetahuan kader mengenai program ini masih rendah, Operasional kader masih rendah, Jumlah anggota pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB 1 orang pokja terlatih dari 1 orang total

pokja, serta Bangunan Sekretariat untuk kegiatan belum ada (masih menumpang di gedung Posyandu dan Kondisi lingkungan yang belum tertata dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia.

Arikunto, S. (2010). Prosedur Riset: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arif, R. (2009). Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama

Creswell, J. W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Herdiansyah, H. (2011). Metodologi Riset Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.

Idrus, M. (2009). Metode Riset Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Erlangga.

Indiahono, D. (2017). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis (Edisi ke-2). Yogyakarta: Gava Media.

Jones, C. O. (1994). The Presidency in a Separated. System. Washington DC, Brookings Institution Press.

Juliantoro, D. (2000). 30 tahun cukup: keluarga berencana dan hak konsumen. Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan PKBI-Yogyakarta dan the Ford Foundation.

Moeloeng, L. J. (2007). Metodologi Riset Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, R. (2012). Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Ratminto dan Winarsih Atik Septi. (2005). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta :Penerbit Pustaka Pelajar.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi riset. Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2017). Metode Riset Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi konsep implementasi kebijakan: Perspektif, model dan kriteria pengukurannya. Jurnal Kebijakan Publik, 14.

Anggraini, T. & Rosdiana Weni. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Kota Pekanbaru. JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019.

Arfan, S., Mayarni, M., & Nasution, M. S. (2021). Responsivity of Public Services in Indonesia during the Covid-19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(1), 552-562.

Hasanah, U. & Adiarto. (2021). Tahapan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampungkeluarga Berencana (Kb) Di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar. JOM FISIP Vol. 8: Edisi I Januari-Juni 2021.

Istiadi, A. (2017). Implementasi program kampung keluarga berencana (studi pada kelompok sasaran keluarga dengan remaja di dusun waung desa sonoageng kecamatan prambon kabupaten nganjuk). Publika, 5(4)

Jones, Charles O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Mayarni, M., & Meiwanda, G. (2019). Peningkatan Ekonomi Rakyat

Berbasis Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 111-116.

Mayarni, M. & Vani, R. V. (2020). Kapabilitas Dynamic Governance Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberlakuan New Normal Di Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 145-167.

Rahman, H. M., & Indrawadi, J. (2019). Implementasi Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 2(3), 295-301.

Rahmeina, F.R. & Meilani, N.L. (2018). Koordinasi Dalam Program Kampung Kb Di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP Vol. 5 No. 1 _ April 2018*.

Vani, R. V., Habibie, D. K., & Maryani, M. (2020). Dynamic Governanc e Pekanbaru City in Policy Implementation About The New Normal in Pandemic Covid-19 Era. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 173-193)

Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2019). Collaborative Governance Melalui Program Kampung Kb Di Kabupaten Jombang. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 162-173.